Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 4, November 2026 (1482-1497)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

ANALISIS KEBIJAKAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PENDIDIKAN DI INDONESIA STUDI PUSTAKA TERHADAP PERMENDIKDASMEN NOMOR 6 TAHUN 2026

Ai Nurjamilah[1], Undang Ruslan Wahyudin[2]
Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia[1,2]
E-mail: ainurjamilah228@gmail.com[1], urwahyudin@fai.unsika.ac.id[2]

ABSTRACT

A safe and comfortable school culture is an important element in supporting the well-being of school communities and the quality of education. This study aims to analyze the Safe and Comfortable School Culture policy from the perspective of educational governance in Indonesia. The study employs a qualitative approach using a literature review and document analysis. The primary data source is Regulation of the Minister of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia Number 6 of 2026 concerning Safe and Comfortable School Culture, supported by relevant journal articles and scholarly literature. The data are analyzed descriptively and qualitatively using Edwards III's policy implementation framework, which comprises communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The analysis indicates that the policy covers physical protection, psychological well-being, sociocultural safety, and digital civility and safety. From an educational governance perspective, its implementation requires clear communication, adequate resources, implementer commitment, and well-coordinated responsibilities. This study emphasizes that the existence of a regulation needs to be supported by coordinated governance and the involvement of relevant stakeholders. However, because the study is limited to documents and literature, it cannot establish the actual level of policy implementation success in schools.

Keywords: *Safe And Comfortable School Culture, Policy Implementation, Educational Governance, Literature Review*

ABSTRAK

Budaya sekolah yang aman dan nyaman merupakan bagian penting dalam mendukung kesejahteraan warga sekolah dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dalam perspektif tata kelola pendidikan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen. Sumber data utama adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, didukung oleh artikel jurnal dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap

pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Dari perspektif tata kelola pendidikan, pelaksanaannya memerlukan penyampaian informasi yang jelas, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, serta pembagian tanggung jawab dan koordinasi yang terarah. Kajian ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi perlu didukung oleh pengelolaan yang terkoordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Namun, karena penelitian terbatas pada dokumen dan literatur, kajian ini belum dapat menyimpulkan tingkat keberhasilan penerapan kebijakan di satuan pendidikan.

Kata kunci: *Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman, Implementasi Kebijakan, Tata Kelola Pendidikan, Studi Pustaka*

PENDAHULUAN

Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga sebagai lingkungan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, membangun hubungan sosial, serta membentuk karakter dan kepribadian. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan seluruh warga sekolah. Lingkungan sekolah yang kurang mendukung dapat menghambat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, mengganggu kesejahteraan psikologis, serta memengaruhi pencapaian hasil belajar. Dengan demikian, keamanan dan kenyamanan sekolah perlu dipahami sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan, bukan sekadar persoalan kedisiplinan atau ketertiban.

Iklim sekolah merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk memahami kondisi tersebut. Wang dan Degol (2016) menjelaskan bahwa iklim sekolah merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan sekolah dan berkaitan dengan hasil perkembangan peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, Voight dan Nation (2016), melalui tinjauan terhadap penelitian mengenai peningkatan iklim sekolah menengah, menunjukkan pentingnya pendekatan yang terencana dalam membangun lingkungan sekolah yang positif. Aldridge dan McChesney (2018) juga menemukan bahwa iklim sekolah memiliki keterkaitan dengan kesehatan mental dan kesejahteraan remaja. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas lingkungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari upaya mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

Dalam konteks Indonesia, Prasetyo (2018) membahas hubungan antara persepsi iklim sekolah dan kesejahteraan subjektif siswa. Selanjutnya, Wibowo et al. (2020) mengkaji hubungan iklim sekolah dan kesejahteraan subjektif dengan

pencapaian siswa di Indonesia menggunakan data PISA 2018. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi lingkungan sekolah dan kesejahteraan peserta didik merupakan aspek yang relevan untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, pembentukan budaya sekolah yang aman dan nyaman perlu didukung oleh kebijakan serta praktik pengelolaan sekolah yang memperhatikan kebutuhan peserta didik, baik dalam aspek pembelajaran, hubungan sosial, maupun kesejahteraan psikologis.

Persoalan keamanan sekolah juga berkaitan dengan pengalaman peserta didik ketika berada di lingkungan pendidikan. Mori et al. (2021), melalui tinjauan sistematis terhadap penelitian mengenai perasaan tidak aman di sekolah, mengkaji keterkaitannya dengan berbagai kesulitan kesehatan mental pada anak dan remaja. Bradshaw et al. (2021) menekankan pentingnya pendekatan iklim sekolah yang komprehensif dalam upaya menangani persoalan keamanan sekolah. Sementara itu, Grazia dan Molinari (2021) menunjukkan bahwa iklim sekolah memiliki berbagai dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran maupun pengembangannya. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan sekolah tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan gangguan fisik, tetapi perlu dilihat secara lebih luas dengan memperhatikan pengalaman, interaksi, dan kondisi psikologis warga sekolah.

Penelitian mengenai dukungan terhadap kesejahteraan di sekolah juga terus berkembang. Limone dan Toto (2022) mengkaji strategi dan protokol psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan sekolah. Scholz et al. (2023) menelaah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas program kesehatan mental dan kesejahteraan universal di sekolah menengah. Di sisi lain, Gonzálvez et al. (2023) mengkaji instrumen pengukuran iklim sekolah yang ditujukan kepada peserta didik, guru, dan orang tua. van Aalst et al. (2024) juga menelaah karakteristik dan perilaku guru sekolah dasar dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi perundungan. Walaupun fokus dan konteks penelitian tersebut berbeda-beda, keseluruhannya memperlihatkan bahwa penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung membutuhkan perhatian terhadap kebijakan, hubungan sosial, peran pendidik, serta kesejahteraan warga sekolah.

Dalam perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai salah satu landasan kebijakan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Peraturan ini memberikan kerangka kebijakan yang mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik,

kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keselamatan dan kesantunan dalam ruang digital (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2026, Pasal 1). Cakupan tersebut menunjukkan bahwa budaya sekolah aman dan nyaman perlu dibangun melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak terbatas pada pengendalian perilaku atau penanganan pelanggaran setelah suatu masalah terjadi.

Keberadaan kebijakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tata kelola pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pengelolaan dan pelaksanaan yang terarah agar tujuan yang dirumuskan dapat diwujudkan dalam praktik. Dalam hal ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat penerapan aturan, tetapi juga merupakan organisasi pendidikan yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan kebijakan membutuhkan kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta mekanisme organisasi yang mendukung. Edward III (1980) menjelaskan empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Kerangka ini dapat digunakan untuk menelaah aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar kebijakan budaya sekolah aman dan nyaman dapat dilaksanakan secara terarah.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas iklim sekolah, kesehatan mental peserta didik, kesejahteraan, perundungan, dan program peningkatan lingkungan sekolah, fokus penelitian tersebut memiliki titik tekan yang beragam. Sebagian penelitian menyoroti hubungan iklim sekolah dengan hasil perkembangan peserta didik, sedangkan penelitian lainnya mengkaji strategi peningkatan kesejahteraan, pengukuran iklim sekolah, atau peran guru dalam pencegahan perundungan. Berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber tersebut, masih diperlukan pembahasan yang secara khusus menelaah kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 dengan menempatkan tata kelola pendidikan sebagai sudut pandang analisis. Fokus tersebut penting karena kajian tentang manfaat lingkungan sekolah yang positif perlu dilengkapi dengan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan dirumuskan, unsur-unsur pelaksanaannya diatur, serta aspek tata kelola apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasinya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan artikel ini terletak pada fokus analisis terhadap kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman tahun 2026 dalam perspektif tata kelola pendidikan di Indonesia. Artikel ini tidak berfokus pada pengukuran

pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar atau kesehatan mental peserta didik, melainkan pada telaah dokumen kebijakan untuk memahami arah kebijakan, cakupan perlindungan yang diatur, dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Analisis implementasi kebijakan digunakan untuk membantu mengidentifikasi aspek komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur organisasi yang relevan bagi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dalam perspektif tata kelola pendidikan di Indonesia. Secara khusus, pembahasan diarahkan pada pemahaman terhadap substansi kebijakan, keterkaitannya dengan konsep iklim sekolah dan kesejahteraan warga sekolah, serta aspek tata kelola yang diperlukan untuk mendukung implementasinya. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian kebijakan pendidikann sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pengelola sekolah dan pendidik dalam membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan seluruh peserta didik.

KAJIAN PUSTAKA

1. Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Budaya sekolah merupakan nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah. Budaya tersebut tercermin dalam interaksi sosial, penerapan aturan, penghargaan terhadap perbedaan, serta upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Budaya sekolah yang positif tidak hanya berkaitan dengan ketertiban, tetapi juga dengan rasa aman, kepedulian, dan dukungan terhadap perkembangan peserta didik.

Konsep yang berkaitan dengan budaya sekolah adalah iklim sekolah (*school climate*). Wang dan Degol (2016) menjelaskan bahwa iklim sekolah memiliki berbagai dimensi yang berkaitan dengan lingkungan dan hasil perkembangan peserta didik. Grazia dan Molinari (2021) juga menunjukkan bahwa iklim sekolah merupakan konsep multidimensional. Sementara itu, Aldridge dan McChesney (2018) membahas keterkaitan iklim sekolah dengan kesehatan mental dan kesejahteraan remaja, sedangkan Mori et al. (2021) mengkaji hubungan pengalaman merasa tidak aman di sekolah dengan kesulitan kesehatan mental pada anak dan remaja. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek fisik, sosial, dan psikologis dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026. Berdasarkan Pasal 1,

konsep tersebut mencakup tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibangun di lingkungan sekolah untuk memenuhi kebutuhan spiritual, memberikan perlindungan fisik, mendukung kesejahteraan psikologis, menjaga keamanan sosiokultural, serta mendorong keadaban dan keamanan digital (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2026).

Dengan demikian, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman merupakan kondisi sekaligus proses yang perlu dibangun secara berkelanjutan melalui interaksi, kebiasaan, dan pengelolaan sekolah. Konsep ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis substansi kebijakan, sedangkan teori implementasi kebijakan digunakan untuk mengkaji kebutuhan tata kelola dalam pelaksanaannya.

2. Tata Kelola Pendidikan

Tata kelola pendidikan merupakan proses pengaturan kewenangan, pengambilan keputusan, koordinasi, pelaksanaan tanggung jawab, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga dengan penyampaian kebijakan, pemanfaatan sumber daya, dan koordinasi antaraktor untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam satuan pendidikan, tata kelola melibatkan pemerintah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kejelasan peran dan koordinasi diperlukan agar setiap pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya secara terarah. Sebaliknya, pembagian tugas yang tidak jelas dan keterbatasan dukungan dapat menghambat penerjemahan kebijakan ke dalam praktik pendidikan.

Dalam pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, tata kelola pendidikan menjadi penghubung antara ketentuan kebijakan dan kegiatan sehari-hari di sekolah. Hal ini memerlukan komunikasi yang jelas, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, serta pembagian tanggung jawab yang terkoordinasi. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan juga diperlukan karena budaya sekolah terbentuk melalui interaksi seluruh warga sekolah, bukan hanya melalui instruksi pimpinan. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan digunakan sebagai perspektif untuk menelaah kebutuhan pengelolaan dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan ketentuan yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata. Dalam bidang pendidikan, keberadaan peraturan belum dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Pelaksanaannya membutuhkan komunikasi yang jelas, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur organisasi yang mendukung.

Edwards III (1980), dalam *Implementing Public Policy*, mengemukakan empat aspek implementasi kebijakan, yaitu

komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat aspek tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka untuk menganalisis kebutuhan tata kelola kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan secara jelas dan konsisten kepada pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya. Dalam kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, komunikasi diperlukan agar warga sekolah memahami tujuan, ruang lingkup, dan tanggung jawab masing-masing. Sosialisasi dan koordinasi yang memadai dapat membantu membangun pemahaman yang selaras mengenai pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya mencakup dukungan sumber daya manusia, informasi, kewenangan, fasilitas, dan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dalam konteks Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, dukungan tersebut diperlukan agar warga sekolah mampu menjalankan perannya dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keamanan digital.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Disposisi berkaitan dengan sikap, penerimaan, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memerlukan kesediaan warga sekolah untuk menghargai perbedaan, menjaga keselamatan, memperhatikan kebutuhan peserta didik, dan menjalankan tanggung jawab secara konsisten. Komitmen ini penting agar pelaksanaan kebijakan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi turut tercermin dalam kebiasaan dan interaksi sehari-hari.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, dan mekanisme koordinasi dalam organisasi. Dalam pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, kejelasan tanggung jawab dan prosedur diperlukan agar setiap pihak memahami perannya serta mengetahui mekanisme pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang terarah juga dapat membantu mengurangi tumpang tindih tugas dan mendukung konsistensi pelaksanaan.

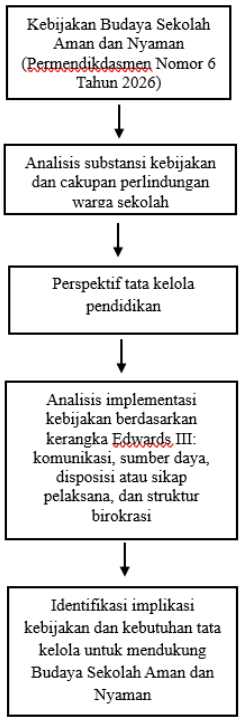
Keempat aspek tersebut saling berkaitan. Komunikasi perlu didukung sumber daya yang memadai, dijalankan oleh pelaksana yang berkomitmen, serta ditopang pembagian tanggung jawab dan prosedur kerja yang jelas. Sitorus (2019) juga menggunakan empat aspek Edwards III dalam kajian implementasi kebijakan pendidikan, sehingga kerangka ini relevan untuk membantu mengarahkan analisis kebijakan dalam penelitian ini. Meskipun demikian,

kerangka Edwards III dalam artikel ini tidak digunakan untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan implementasi di sekolah. Karena penelitian berbasis studi pustaka dan analisis dokumen, keempat aspek tersebut berfungsi sebagai kategori analisis untuk menelaah substansi kebijakan dan mengidentifikasi kebutuhan tata kelola berdasarkan sumber yang dikaji.

4. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini menghubungkan kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dengan perspektif tata kelola pendidikan dan teori implementasi kebijakan. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menjadi dokumen utama yang ditelaah untuk memahami tujuan dan cakupan perlindungan warga sekolah. Selanjutnya, substansi kebijakan dianalisis melalui perspektif tata kelola pendidikan dengan menggunakan empat aspek implementasi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Analisis tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi implikasi kebijakan dan kebutuhan tata kelola yang relevan dalam mendukung terwujudnya Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Kerangka berpikir ini menjadi dasar dalam mengarahkan analisis dokumen pada bagian metode, hasil, dan pembahasan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 dan Edwards III (1980)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang didukung analisis dokumen. Menurut Zed (2014), penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang meliputi pengumpulan bahan pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Sementara itu, Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen dapat digunakan sebagai metode penelitian kualitatif untuk menelaah dokumen sebagai sumber data penelitian.

Metode ini dipilih karena penelitian berjudul "Analisis Kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dalam Perspektif Tata Kelola Pendidikan di Indonesia" berfokus pada penelaahan kebijakan tertulis dan literatur ilmiah, bukan pada pengukuran kondisi lapangan atau pengalaman informan. Sumber data primer berupa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, sedangkan sumber sekunder meliputi artikel jurnal dan buku yang relevan dengan budaya sekolah, tata kelola pendidikan, serta implementasi kebijakan publik.

Data dikumpulkan melalui penelusuran dan penelaahan sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui identifikasi substansi kebijakan, pengelompokan informasi berdasarkan tema, interpretasi isi dokumen, dan pengaitan hasil telaah dengan kerangka implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan substansi kebijakan serta mengidentifikasi implikasinya terhadap tata kelola pendidikan berdasarkan sumber yang ditelaah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arah Kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menempatkan keamanan dan kenyamanan sebagai bagian menyeluruh dari penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang aman tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik dan pencegahan kekerasan, tetapi juga dengan kualitas hubungan sosial, penghargaan terhadap martabat manusia, dan perilaku warga sekolah di ruang digital (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2026).

Arah kebijakan tersebut memperlihatkan pergeseran penekanan dari penanganan masalah setelah terjadi menuju upaya membangun kondisi yang mendukung keamanan dan kenyamanan sejak awal. Portal resmi Kemendikdasmen menjelaskan bahwa penyelenggaraan BSAN mengutamakan pendekatan promotif, preventif, humanis, komprehensif, dan partisipatif. Pendekatan tersebut mencakup penguatan tata kelola sekolah, edukasi bagi warga sekolah, pembagian peran dan tanggung jawab,

serta mekanisme respons dan penanganan pelanggaran yang kolaboratif, adil, dan berorientasi pada pemulihan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2026).

Dari perspektif tata kelola pendidikan, pendekatan ini menunjukkan bahwa penciptaan sekolah yang aman dan nyaman tidak cukup dilakukan melalui penyusunan tata tertib atau pemberian sanksi. Sekolah juga perlu mengembangkan kebiasaan positif, komunikasi yang terbuka, kepedulian terhadap kebutuhan peserta didik, serta keterlibatan berbagai pihak. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Wang dan Degol (2016) bahwa iklim sekolah merupakan konsep multidimensional yang perlu dipahami melalui berbagai aspek lingkungan sekolah. Aldridge dan McChesney (2018) juga menunjukkan relevansi iklim sekolah terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan remaja.

Dengan demikian, kebijakan BSAN memiliki relevansi dengan kajian iklim sekolah dan kesejahteraan peserta didik. Perbedaannya, kebijakan ini memberikan kerangka normatif bagi penyelenggaraan budaya sekolah yang aman dan nyaman, sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji dimensi iklim sekolah, kesejahteraan, dan hasil perkembangan peserta didik. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi satuan pendidikan untuk menerjemahkan nilai keamanan dan kenyamanan ke dalam pengelolaan serta kebiasaan sehari-hari.

2. Analisis Kebijakan Berdasarkan Kerangka Implementasi Edwards III

Untuk memahami kebutuhan tata kelola dalam pelaksanaan BSAN, substansi kebijakan dianalisis menggunakan empat aspek implementasi kebijakan yang dikemukakan Edwards III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini digunakan sebagai kategori analisis dokumen, bukan sebagai ukuran keberhasilan implementasi di sekolah tertentu.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek penting karena kebijakan perlu dipahami oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kebijakan BSAN mencakup beberapa dimensi, mulai dari perlindungan fisik hingga kesejahteraan psikologis dan keamanan digital. Luasnya cakupan tersebut memerlukan penyampaian informasi yang jelas agar warga sekolah memahami bahwa budaya aman dan nyaman merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan penanganan pelanggaran.

Dalam tata kelola sekolah, komunikasi dapat mendukung penyamaan pemahaman antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Penjelasan kebijakan perlu diterjemahkan ke dalam informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan peran masing-masing pihak. Misalnya, warga sekolah perlu memahami perilaku yang mendukung

keamanan, saluran penyampaian persoalan, serta mekanisme respons yang berlaku.

Kebutuhan tersebut sejalan dengan Edwards III (1980), yang menempatkan komunikasi sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang tidak jelas atau tidak konsisten berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, dari hasil analisis kebijakan, komunikasi dapat dipandang sebagai salah satu kebutuhan tata kelola yang perlu diperhatikan agar tujuan BSAN dapat diterjemahkan ke dalam tindakan yang terarah. Namun, efektivitas komunikasi di satuan pendidikan tertentu memerlukan penelitian lanjutan dengan data lapangan.

b. Sumber Daya

Aspek sumber daya berkaitan dengan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Dalam konteks BSAN, dukungan tersebut dapat berupa kapasitas sumber daya manusia, informasi, kewenangan, fasilitas, dan pembiayaan yang relevan. Kebijakan yang mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, dan keamanan digital memerlukan kesiapan yang sesuai dengan kebutuhan setiap satuan pendidikan.

Kapasitas sumber daya manusia penting karena pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai peran. Kepala sekolah perlu mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan, sedangkan guru dan tenaga kependidikan perlu memahami tanggung jawabnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dukungan informasi dan fasilitas juga diperlukan agar kegiatan edukasi, pencegahan, serta respons terhadap persoalan dapat dijalankan sesuai ketentuan.

Edwards III (1980) menegaskan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung atau membatasi implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, analisis BSAN menunjukkan pentingnya kesesuaian antara tuntutan kebijakan dan dukungan yang tersedia. Meskipun demikian, kajian dokumen ini tidak dapat menyimpulkan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia telah memiliki atau belum memiliki sumber daya yang memadai. Kesimpulan semacam itu memerlukan bukti empiris dari satuan pendidikan dan pemerintah daerah.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Dalam penyelenggaraan BSAN, kebijakan tidak hanya membutuhkan pemahaman formal, tetapi juga penerimaan dan kesediaan warga sekolah untuk membangun kebiasaan yang mendukung keamanan serta kenyamanan. Sikap tersebut dapat tercermin melalui penghargaan terhadap perbedaan, kepedulian terhadap kebutuhan peserta didik, perilaku yang bertanggung jawab di ruang digital, dan kesediaan menindaklanjuti persoalan sesuai prosedur.

Aspek ini penting karena budaya sekolah terbentuk melalui praktik dan

interaksi yang berulang. Peraturan dapat memberikan arah, tetapi nilai dan kebiasaan perlu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Scholz et al. (2023), melalui tinjauan sistematis tentang program kesehatan mental dan kesejahteraan di sekolah menengah, membahas berbagai faktor yang berkaitan dengan efektivitas program tersebut. Sementara itu, Bradshaw et al. (2021) menekankan pentingnya pendekatan iklim sekolah yang komprehensif dalam upaya meningkatkan keamanan sekolah.

Kedua kajian tersebut mendukung pemahaman bahwa upaya membangun lingkungan sekolah yang positif perlu melibatkan praktik yang konsisten, bukan hanya aturan formal. Dalam perspektif Edwards III (1980), komitmen pelaksana merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, BSAN perlu dipahami sebagai tanggung jawab yang harus diterjemahkan ke dalam sikap dan kebiasaan warga sekolah. Akan tetapi, tingkat komitmen pelaksana dalam praktik tidak dapat ditentukan hanya dari dokumen peraturan.

d. Struktur Birokrasi dan Pembagian Tanggung Jawab

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, dan koordinasi antaraktor. Berdasarkan penjelasan resmi Kemendikdasmen, penyelenggaraan BSAN di sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan murid serta partisipasi orang tua, masyarakat, dan media. Pada tingkat pemerintah daerah, tanggung jawab penyelenggaraan berada pada kepala daerah melalui Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2026).

Pengaturan tersebut memperlihatkan pentingnya kejelasan peran pada tingkat satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Kepala sekolah memerlukan dukungan dan koordinasi dengan warga sekolah, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam penyelenggaraan kebijakan sesuai kewenangannya. Pelibatan keluarga dan masyarakat juga menunjukkan bahwa keamanan dan kenyamanan sekolah tidak ditempatkan sebagai tanggung jawab sekolah semata.

Portal resmi Kemendikdasmen juga menjelaskan bahwa Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah serta satuan tugas terkait dinyatakan tidak lagi berlaku berdasarkan kebijakan BSAN. Penyelenggaraan kebijakan menggunakan pengaturan tanggung jawab dan mekanisme yang ditetapkan dalam regulasi baru tersebut (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2026). Perubahan ini menjadikan kejelasan pembagian tugas, pemahaman terhadap prosedur baru, dan koordinasi antaraktor sebagai aspek penting dalam tata kelola.

Dalam kerangka Edwards III (1980), struktur organisasi yang jelas

dapat membantu pelaksana memahami tanggung jawab dan prosedur yang harus diikuti. Sebaliknya, ketidakjelasan peran berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab. Oleh karena itu, implikasi tata kelola yang dapat ditarik dari dokumen BSAN adalah perlunya penyelarasan pemahaman mengenai peran, kewenangan, koordinasi, dan mekanisme respons sesuai ketentuan yang berlaku. Kajian ini tidak menyimpulkan bahwa perubahan struktur tersebut telah berjalan efektif di seluruh daerah karena hal itu membutuhkan bukti pelaksanaan di lapangan.

3. Sintesis Hasil Analisis dan Implikasi bagi Tata Kelola Pendidikan

Berdasarkan analisis substansi kebijakan dan empat aspek implementasi Edwards III, terdapat keterkaitan antara cakupan BSAN yang menyeluruh dan kebutuhan tata kelola yang terkoordinasi. Kebijakan ini mencakup berbagai dimensi kehidupan warga sekolah, sehingga pelaksanaannya memerlukan komunikasi yang jelas, sumber daya yang sesuai, komitmen pelaksana, serta pembagian tugas dan prosedur yang dapat dipahami.

Hasil telaah tersebut sejalan dengan penelitian Wang dan Degol (2016) serta Grazia dan Molinari (2021), yang menunjukkan bahwa iklim sekolah memiliki berbagai dimensi. Kajian Aldridge dan McChesney (2018) serta Mori et al. (2021) juga menegaskan relevansi lingkungan sekolah terhadap kesejahteraan dan kesehatan mental anak serta remaja. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami mengapa keamanan dan kenyamanan perlu dipandang secara menyeluruh. Sementara itu, kebijakan BSAN memberikan kerangka formal untuk mengarahkan penyelenggaraan budaya sekolah dalam konteks pendidikan Indonesia.

Kontribusi analisis ini terletak pada penghubungan antara substansi kebijakan BSAN dan aspek implementasi kebijakan publik. Dengan menggunakan kerangka Edwards III, kajian tidak berhenti pada uraian isi peraturan, tetapi mengidentifikasi kebutuhan tata kelola yang relevan bagi pelaksanaannya. Komunikasi membantu penyamaan pemahaman; sumber daya mendukung pelaksanaan kegiatan; disposisi berkaitan dengan komitmen untuk menerapkan nilai kebijakan; sedangkan struktur birokrasi membantu memastikan kejelasan peran dan koordinasi.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini terbatas pada analisis dokumen dan literatur. Oleh karena itu, hasilnya tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa kebijakan BSAN telah berhasil atau gagal diterapkan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi kebijakan di satuan pendidikan atau pemerintah daerah melalui wawancara, observasi, maupun data evaluasi. Dengan demikian,

analisis kebijakan dalam artikel ini berfungsi sebagai dasar konseptual untuk memahami arah kebijakan dan kebutuhan tata kelola, sekaligus membuka ruang bagi penelitian empiris mengenai pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi pustaka dan analisis dokumen, kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 menunjukkan bahwa keamanan dan kenyamanan sekolah perlu dipahami secara menyeluruh, meliputi perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Dalam perspektif tata kelola pendidikan, pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan komunikasi yang jelas, dukungan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta pembagian tugas dan koordinasi yang terarah. Berdasarkan kerangka implementasi kebijakan Edwards III, keempat aspek tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan tata kelola dalam mendukung penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Kajian ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi perlu diikuti dengan pengelolaan yang terkoordinasi dan keterlibatan warga sekolah serta pemangku kepentingan terkait. Namun, karena penelitian ini terbatas pada studi pustaka dan analisis dokumen, hasilnya belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan penerapan kebijakan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan secara empiris di sekolah atau pemerintah daerah agar dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dalam praktik pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Aldridge, J. M., & McChesney, K. (2018). The relationships between school climate and adolescent mental health and wellbeing: A systematic literature review. *International Journal of Educational Research, 88*, 121–145. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.01.012

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Bradshaw, C. P., Cohen, J., Espelage, D. L., & Nation, M. (2021). Addressing school safety through comprehensive school climate approaches. *School Psychology Review, 50*(2–3), 221–236. https://doi.org/10.1080/2372966X.2021.1926321

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Gonzálvez, C., Bacon, V., & Kearney, C. A. (2023). Systematic and evaluative review of school climate instruments for students, teachers, and parents. *Psychology in the Schools, 60*(6), 1781–1836. https://doi.org/10.1002/pits.22838

Grazia, V., & Molinari, L. (2021). School climate multidimensionality and measurement: A systematic literature review. *Research Papers in Education, 36*(5), 561–587. https://doi.org/10.1080/0267152 2.2019.1697735

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026, January 12). *Bangun lingkungan belajar aman dan nyaman, Kemendikdasmen terbitkan Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026*. https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14536-bangun-lingkungan-belajar-aman-dan-nyaman-kemendikdasmen-terbitkan-permendikdasmen-no-6-tahun-2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026

Limone, P., & Toto, G. A. (2022). Psychological strategies and protocols for promoting school well-being: A systematic review. *Frontiers in Psychology, 13*, 914063. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.914063

Mori, Y., Tiiri, E., Khanal, P., Khakurel, J., Mishina, K., & Sourander, A. (2021). Feeling unsafe at school and associated mental health difficulties among children and adolescents: A systematic review. *Children, 8*(3), 232. https://doi.org/10.3390/children8030232

Prasetyo, R. A. B. (2018). Persepsi iklim sekolah dan kesejahteraan subjektif siswa di sekolah. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan, 8*(2), 133–144. https://doi.org/10.26740/jptt.v8n2.p133-144

Scholz, D., Taylor, A., & Strelan, P. (2023). Factors contributing to the efficacy of universal mental health and wellbeing programs in secondary schools: A systematic review. *Adolescent Research Review, 8*, 117–136. https://doi.org/10.1007/s40894-022-00193-6

Sitorus, M. (2019). Pengaruh communication, resources,

disposition, dan bureaucratic structure terhadap implementasi kebijakan pendidikan (Studi kasus pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tobasamosir). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 4*(1). https://doi.org/10.31113/jia.v4i1.412

Van Aalst, D. A., Huitsing, G., & Veenstra, R. (2024). A systematic review on primary school teachers' characteristics and behaviors in identifying, preventing, and reducing bullying. *International Journal of Bullying Prevention, 6*, 124–137. https://doi.org/10.1007/s42380-022-00145-7

Voight, A., & Nation, M. (2016). Practices for improving secondary school climate: A systematic review of the research literature. *American Journal of Community Psychology, 58*(1–2), 174–191. https://doi.org/10.1002/ajcp.12074

Wang, M.-T., & Degol, J. L. (2016). School climate: A review of the construct, measurement, and impact on student outcomes. *Educational Psychology Review, 28*(2), 315–352. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9319-1

Wibowo, Y. S., Setiawati, F. A., Qodriah, S. R., Nizeyumukiza, E., & Ayriza, Y. (2020). Do school climate and subjective well-being affect student achievement in Indonesia?: A linear regression analysis. *Jurnal Pendidikan Progresif, 10*(2), 183–191. https://doi.org/10.23960/jpp.v10.i2.202004

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.